# SINERGITAS KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI DESA LANDU, KECAMATAN ROTE BARAT DAYA, KABUPATEN ROTE NDAO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Alvian Priya Messakh
NPP. 33.0659
*Program Studi Politik Indonesia Terapan*
Email: Messakhalvian@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Maichel Wutoy, M.M
Email: maichel.wutoy@ipdn.ac.id

## *ABSTRACT*

***Problem Statement:*** *This research is motivated by the issue of synergy between the Village Head and the Village Consultative Body (BPD) in providing clean water in Landu Village. While clean water is a fundamental human right recognized under SDG Goal 6, Landu Village as an island village in Rote Ndao Regency, East Nusa Tenggara Province, continues to face critical clean water challenges due to geographic constraints, limited infrastructure, and suboptimal institutional coordination between the Village Head and BPD.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the form of synergy between the Village Head and the BPD in providing clean water in Landu Village.* ***Method:*** *This study employs a descriptive qualitative approach using in-depth interview and documentation techniques involving 6 informants, with data validity tested through source triangulation. The main theory used is Doctoroff's (1977) synergy theory encompassing four dimensions: effective communication, feedback, trust, and creativity.* ***Results:*** *The synergy between the Village Head and the BPD has been formed through institutional interaction via the Musrenbang forum as the main coordination space. In the effective communication dimension, communication runs relatively well through formal and informal forums, though information distribution is not yet even. In the feedback dimension, community aspirations are accommodated through village deliberation mechanisms and followed up in RKPDes documents. In the trust dimension, both parties demonstrate commitment through consistent program implementation with transparent reporting. In the creativity dimension, innovation is reflected in the distribution of water storage tanks (profil tank) with 2100-liter and 1500-liter capacities and plans for submarine pipeline construction from neighboring islands.* ***Conclusion:*** *The synergy between the Village Head and the BPD in*

*providing clean water in Landu Village has been established through institutional collaboration across the dimensions of effective communication, feedback, trust, and creativity, although it has not been fully optimal due to limitations in information distribution and clean water infrastructure.*

*Keywords: BPD; clean water; Landu Village; synergy; village head*



# ABSTRAK

**Permasalahan:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu sinergitas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyediaan air bersih di Desa Landu. Meskipun air bersih merupakan hak dasar manusia yang diakui dalam SDGs poin ke-6, Desa Landu sebagai desa kepulauan di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih menghadapi tantangan serius dalam penyediaan air bersih akibat keterbatasan geografis, infrastruktur yang terbatas, dan koordinasi kelembagaan antara Kepala Desa dan BPD yang belum optimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sinergitas antara Kepala Desa dan BPD dalam penyediaan air bersih di Desa Landu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi yang melibatkan 6 informan, serta pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber. Teori utama yang digunakan adalah teori sinergitas dari Doctoroff (1977) yang mencakup empat dimensi yaitu komunikasi yang efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. **Hasil/Temuan:** Sinergitas antara Kepala Desa dan BPD telah terbentuk melalui interaksi kelembagaan melalui forum Musrenbang sebagai ruang koordinasi utama. Pada dimensi komunikasi yang efektif, komunikasi berjalan relatif baik melalui forum formal dan informal, meskipun distribusi informasi belum merata. Pada dimensi umpan balik, aspirasi masyarakat diakomodasi melalui mekanisme musyawarah desa dan ditindaklanjuti dalam dokumen RKPDes. Pada dimensi kepercayaan, kedua pihak menunjukkan komitmen melalui pelaksanaan program yang konsisten dengan pelaporan yang transparan. Pada dimensi kreativitas, inovasi tercermin melalui distribusi profil tank berkapasitas 2100 liter dan 1500 liter serta rencana pembangunan pipa bawah laut dari pulau sebelah. **Kesimpulan:** Sinergitas Kepala Desa dan BPD dalam penyediaan air bersih di Desa Landu telah terbentuk melalui kolaborasi kelembagaan pada dimensi komunikasi yang efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas, meskipun belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan distribusi informasi dan infrastruktur air bersih.



**Kata kunci:** air bersih; BPD; Desa Landu; kepala desa; sinergitas

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi hak setiap warga negara dan dijamin pemenuhannya oleh negara. Secara global, penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak telah diakui sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-6 yang harus dicapai pada tahun 2030. Di Indonesia, akses air bersih masih menjadi permasalahan serius, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak secara nasional masih belum merata, di mana Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk dalam kategori provinsi dengan akses air minum yang masih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Kabupaten Rote Ndao sebagai daerah kepulauan paling selatan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penyediaan air bersih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, persentase rumah tangga menurut sumber air minum utama menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang mengandalkan sumber air tidak layak, khususnya di desa-desa terpencil dan kepulauan. Desa Landu yang terletak di Kecamatan Rote Barat Daya merupakan salah satu desa kepulauan yang menghadapi permasalahan air bersih yang cukup serius, terutama pada musim kemarau ketika sumber air tawar semakin menipis.

Dalam konteks pemerintahan desa, penyelenggaraan pelayanan dasar termasuk penyediaan air bersih merupakan tanggung jawab bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan secara sinergis antara Kepala Desa sebagai pelaksana kebijakan dan BPD sebagai lembaga representasi masyarakat yang menjalankan fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan. Sinergitas antara kedua lembaga ini menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan desa, termasuk penyediaan air bersih. Tantangan kelembagaan semacam ini juga ditemukan pada konteks internasional, di mana Jackson, Stewart, dan Beal (2019) menemukan bahwa kolaborasi tata kelola air yang berkelanjutan di komunitas terpencil dan kepulauan kerap terhambat oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan komunikasi, dan rendahnya kepercayaan antara penyedia layanan dan masyarakat setempat.

Namun dalam praktiknya, sinergitas antara Kepala Desa dan BPD dalam penyediaan air bersih di Desa Landu belum berjalan secara optimal. Terdapat keterbatasan dalam distribusi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, belum adanya Peraturan Desa yang secara khusus mengatur pengelolaan air bersih, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya dalam menyediakan air bersih yang merata bagi seluruh warga Desa Landu. Kondisi geografis sebagai desa kepulauan juga menjadi faktor penghambat dalam mengoptimalkan koordinasi dengan PDAM Kabupaten Rote Ndao.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Berbagai studi terdahulu telah mengkaji tentang peran BPD dalam pemerintahan desa dan penyediaan layanan dasar di desa, namun aspek yang telah diteliti, aspek yang belum diteliti, serta keterbatasan dari penelitian-penelitian tersebut perlu diuraikan secara tegas untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam mengisi kekosongan kajian yang ada.

**Aspek yang telah diteliti.** Anugerah, Fadhli, dan Yahya (2024) telah mengkaji sinergitas aktor good governance dalam pengelolaan sampah perkotaan, dengan fokus pada koordinasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat di wilayah yang memiliki sumber daya dan infrastruktur relatif memadai. Firman (2020) telah membahas peranan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum melalui pendekatan normatif yuridis, dengan menyoroti fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan BPD tanpa menelaah secara spesifik bentuk interaksi sinergitasnya dengan Kepala Desa pada program tertentu. Bota dkk. (2024) telah mengkaji pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah desa dalam penyediaan air bersih di dua desa di Kabupaten Lembata, namun analisis tersebut terbatas pada aspek pelaksanaan tugas administratif pemerintah desa secara umum. Pada level internasional, Jackson dkk. (2019) telah mengidentifikasi berbagai hambatan tata kelola air kolaboratif di komunitas terpencil dan kepulauan, namun penelitian tersebut berfokus pada konteks komunitas adat di Australia dengan struktur kelembagaan yang berbeda dari pemerintahan desa di Indonesia.

**Aspek yang belum diteliti dan keterbatasan penelitian sebelumnya.** Penelitian Anugerah dkk. (2024) tidak menyentuh konteks pemerintahan desa maupun penyediaan air bersih, sehingga tidak dapat menggambarkan dinamika sinergitas pada skala desa dengan keterbatasan geografis ekstrem. Penelitian Firman (2020) memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan tidak didukung oleh data empiris lapangan mengenai bagaimana sinergitas tersebut benar-benar terwujud dalam pelaksanaan program konkret seperti

penyediaan air bersih. Penelitian Bota dkk. (2024), meskipun secara lokus telah menyentuh isu air bersih di desa, tidak secara khusus menggunakan kerangka teori sinergitas kelembagaan sehingga tidak mengukur dimensi komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas antara Kepala Desa dan BPD secara sistematis. Penelitian Jackson dkk. (2019), meskipun relevan dari segi tema tata kelola air di wilayah terpencil, tidak menggunakan kerangka sinergitas kelembagaan desa sebagaimana konteks pemerintahan di Indonesia dan tidak melibatkan analisis terhadap relasi Kepala Desa dan BPD. Selain itu, keempat penelitian tersebut tidak mengkaji konteks desa kepulauan Indonesia yang memiliki keterbatasan akses PDAM dan ketergantungan tinggi terhadap pengelolaan air mandiri, sebagaimana kondisi yang dihadapi oleh Desa Landu.

**Posisi penelitian ini dalam mengisi kekosongan penelitian.** Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang nyata mengenai bagaimana sinergitas Kepala Desa dan BPD dibangun dan diwujudkan secara empiris dalam konteks penyediaan air bersih di desa kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan infrastruktur terbatas. Penelitian ini diposisikan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara spesifik bentuk sinergitas Kepala Desa dan BPD pada empat dimensi sinergitas Doctoroff (1977), yaitu komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas, pada locus penelitian yang belum banyak dikaji sebelumnya, yaitu Desa Landu sebagai desa kepulauan di Kabupaten Rote Ndao.

## 1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena akses terhadap air bersih merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat Desa Landu. Penyediaan air bersih yang belum optimal berdampak pada kesehatan masyarakat, produktivitas, serta kualitas sanitasi lingkungan. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah desa dan pemangku kebijakan di Kabupaten Rote Ndao akan kekurangan basis empiris yang kuat dalam memahami dinamika sinergitas kelembagaan dalam penyediaan air bersih, sehingga perumusan solusi dan kebijakan berisiko tidak tepat sasaran. Penelitian ini juga memiliki urgensi akademis dalam pengembangan keilmuan pemerintahan desa, khususnya dalam kajian sinergitas kelembagaan di desa-desa kepulauan yang selama ini masih minim perhatian.

## 1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian sinergitas kelembagaan pemerintahan desa dan penyediaan air bersih. Anugerah, Fadhli, dan Yahya (2024) mengkaji sinergitas aktor good governance dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru menggunakan metode kualitatif, menemukan bahwa sinergitas antar aktor yang efektif memerlukan komunikasi yang intensif dan pembagian peran yang jelas. Firman (2020) meneliti peranan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan pendekatan normatif yuridis, menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi BPD sangat bergantung pada kualitas hubungan kemitraan dengan Kepala Desa. Kushandajani (2017) mengkaji implikasi UU Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, menekankan bahwa relasi antara Kepala Desa dan BPD perlu diperkuat melalui mekanisme musyawarah yang inklusif. Bota dkk. (2024) mengkaji pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah desa dalam penyediaan air bersih, menemukan berbagai hambatan kelembagaan dalam pengelolaan air bersih di desa terpencil. Suryandari dan Isbandono (2025) meneliti optimalisasi peran pemerintah desa dalam mengatasi krisis air bersih, menyimpulkan bahwa inovasi dan kolaborasi lintas lembaga merupakan kunci penanganan krisis air. Nadirah (2023) mengkaji strategi pemerintah desa dalam penyediaan air bersih di Desa Bakaru, menemukan bahwa kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak eksternal sangat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya lokal. Pada level internasional, Jackson, Stewart, dan Beal (2019) mengidentifikasi lima kategori hambatan tata kelola air kolaboratif di komunitas terpencil, yaitu pengaturan kelembagaan, faktor ekonomi dan finansial, data dan informasi, kapasitas dan keterampilan, serta nilai budaya, yang relevan sebagai pembanding bagi konteks desa kepulauan di Indonesia.

## 1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu dilihat dari segi objek penelitian, yaitu Desa Landu sebagai desa kepulauan dengan kondisi geografis yang unik dan ekstrem. Berbeda dengan penelitian Bota dkk. (2024) yang berfokus pada pelaksanaan tugas pemerintah desa secara umum, penelitian ini secara spesifik mengkaji dimensi sinergitas kelembagaan menggunakan teori Doctoroff (1977) yang mencakup empat dimensi: komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. Penggunaan teori ini berbeda dari pendekatan yang digunakan oleh Anugerah dkk. (2024) maupun Kushandajani (2017). Selain itu, konteks desa kepulauan yang menghadapi keterbatasan akses PDAM

dan ketergantungan pada pengelolaan air mandiri menjadikan penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi karakteristik lokus penelitian yang belum banyak dikaji sebelumnya, termasuk dibandingkan dengan studi internasional pada komunitas kepulauan lain seperti yang dilakukan oleh Jackson dkk. (2019).

### 1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sinergitas antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyediaan air bersih di Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam dan komprehensif tentang sinergitas Kepala Desa dan BPD dalam penyediaan air bersih di Desa Landu. Pendekatan ini dipilih karena fenomena sinergitas kelembagaan bersifat kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui data numerik, sehingga dibutuhkan pemahaman mendalam melalui perspektif para aktor yang terlibat langsung (Creswell & Creswell, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 6 informan yang dipilih secara purposive berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan pemerintahan desa dan program air bersih. Informan tersebut terdiri dari: Kepala Desa Landu sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan kebijakan tertinggi dalam pemerintahan desa; Ketua BPD Desa Landu sebagai representasi fungsi legislasi dan pengawasan; Kepala Urusan Pelayanan sebagai pelaksana teknis program di lapangan; Camat Rote Barat Daya sebagai pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa; Plt. Dirut PDAM Kabupaten Rote Ndao sebagai pihak eksternal yang memberikan dukungan teknis; serta dua orang masyarakat Desa Landu sebagai penerima manfaat langsung program.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemerintah desa, BPD, PDAM, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, pada bulan Januari 2026 selama kurang lebih dua minggu.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis sinergitas Kepala Desa dan BPD dalam penyediaan air bersih di Desa Landu menggunakan teori sinergitas dari Doctoroff (1977) yang mencakup empat dimensi, yaitu: komunikasi yang efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### 3.1. Komunikasi yang Efektif

Dimensi komunikasi yang efektif diukur melalui kejelasan informasi yang disampaikan dalam rapat dan musyawarah desa, serta kesamaan persepsi terhadap tujuan penyediaan air bersih. Berdasarkan hasil penelitian, forum utama komunikasi antara Kepala Desa dan BPD adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) yang dilaksanakan secara rutin.

Hasil wawancara dengan Camat Rote Barat Daya menyatakan bahwa: "Terdapat forum formal berupa Musrenbang yang secara rutin dilaksanakan sebagai ruang deliberatif antara pemerintah desa dan BPD. Dalam setiap musyawarah, pemerintah desa dan BPD telah menyampaikan informasi secara terbuka mengenai kondisi air bersih, termasuk keterbatasan yang dihadapi dan rencana penanganannya." Sejalan dengan itu, Kepala Desa Landu menyampaikan bahwa: "Kami selalu mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Dalam setiap musyawarah, kami berusaha menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada masyarakat, termasuk keterbatasan air dan upaya yang sedang dilakukan, agar masyarakat dapat memahami dan mendukung program yang dijalankan."

Namun demikian, terdapat kendala dalam pemerataan distribusi informasi. Ketua BPD mengungkapkan bahwa: "Kendala yang sering terjadi adalah belum meratanya informasi kepada seluruh masyarakat karena tidak semua dapat hadir dalam musyawarah." Masyarakat juga membenarkan bahwa informasi terkait program air bersih yang diberikan oleh pemerintah desa sudah cukup jelas, namun belum menjangkau seluruh warga secara merata. Kondisi ini diatasi melalui penyampaian ulang informasi oleh kepala dusun dan tokoh masyarakat sebagai perpanjangan tangan komunikasi kelembagaan.

Temuan ini konsisten dengan pandangan Paredes-Saavedra dkk. (2024) yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif dan kepercayaan merupakan elemen fundamental dalam membangun sinergitas tim yang tinggi kinerjanya dalam konteks organisasi. Temuan ini juga sejalan dengan Jackson, Stewart, dan Beal (2019) yang

menemukan bahwa lemahnya koordinasi dan komunikasi antarlembaga merupakan salah satu hambatan utama dalam tata kelola air kolaboratif di komunitas terpencil. Meskipun komunikasi formal melalui Musrenbang telah berjalan dengan baik, optimalisasi saluran komunikasi informal perlu ditingkatkan agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

### 3.2. Umpan Balik

Dimensi umpan balik diukur melalui ada tidaknya forum musyawarah sebagai wadah umpan balik kebijakan dan proses tindak lanjut dari umpan balik yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme umpan balik di Desa Landu telah terbentuk melalui forum musyawarah desa dan jalur informal melalui BPD sebagai representasi masyarakat.

Kepala Desa menyatakan bahwa: "Pemerintah desa selalu bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan oleh masyarakat maupun BPD. Kami memandang bahwa masukan tersebut merupakan bagian penting dalam proses perbaikan pelayanan publik." Mekanisme tindak lanjut dituangkan melalui penyusunan program dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintah desa dengan pengawasan dari BPD. Ketua BPD mengkonfirmasi bahwa: "Hasil musyawarah antara pemerintah desa dan BPD biasanya dituangkan dalam dokumen perencanaan desa seperti RKPDes."

Terdapat evaluasi berkala terhadap program air bersih yang dilakukan melalui rapat evaluasi antara pemerintah desa dan BPD. Camat menyampaikan bahwa evaluasi juga dilakukan oleh pihak kecamatan sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun mekanisme umpan balik sudah berjalan, Plt. Dirut PDAM mencatat bahwa koordinasi dengan PDAM masih bersifat konsultatif dan belum optimal karena keterbatasan jangkauan layanan ke wilayah kepulauan Desa Landu.

### 3.3. Kepercayaan

Dimensi kepercayaan diukur melalui komitmen bersama dalam melaksanakan hasil musyawarah dan adanya transparansi dalam pengelolaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan antara Kepala Desa dan BPD terbangun melalui

konsistensi dalam menjalankan keputusan bersama dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Kepala Desa menyatakan: "Sebagai Kepala Desa, kami berkomitmen untuk menjalankan setiap keputusan yang telah disepakati bersama BPD dalam forum musyawarah. Kepercayaan masyarakat dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program yang dilaksanakan serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan." Ketua BPD mengkonfirmasi: "Komitmen antara Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan keputusan bersama dapat dikatakan cukup baik, yang ditunjukkan melalui konsistensi dalam menjalankan hasil keputusan bersama."

Camat menilai bahwa Kepala Desa menjaga kepercayaan masyarakat melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Masyarakat menyatakan bahwa mereka terbantu dengan adanya program bantuan penampungan air, yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa cukup tinggi. Pemerintah desa secara rutin menyampaikan laporan dan informasi kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang telah disepakati bersama.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Daniel, Al Djono, dan Iswarani (2023) yang menekankan bahwa kepercayaan dan partisipasi merupakan faktor kritis dalam keberhasilan program penyediaan air bersih berbasis masyarakat. Temuan ini juga memperkuat pandangan Jackson, Stewart, dan Beal (2019) yang menyatakan bahwa rendahnya kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi penghambat utama tata kelola air yang kolaboratif, sehingga keberadaan kepercayaan yang terbangun di Desa Landu menjadi modal sosial penting dalam memperkuat sinergitas antara Kepala Desa dan BPD dalam pengelolaan program air bersih.

### 3.4. Kreativitas

Dimensi kreativitas diukur melalui inovasi dan terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih. Hasil penelitian menemukan beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD Desa Landu. Kepala Desa mengungkapkan: "Pemerintah Desa Landu telah melakukan inovasi dengan memberikan bantuan profil tank (tandon air) kepada seluruh masyarakat desa dengan kapasitas 2100

liter dan 1500 liter. Bantuan ini sangat membantu masyarakat dalam menampung air hujan yang digunakan kembali saat musim kemarau untuk kebutuhan sehari-hari." Ketua BPD menambahkan terdapat rencana inovasi lanjutan berupa pembangunan pipa bawah laut yang dirancang untuk menyalurkan air dari sumber mata air di pulau sebelah menuju titik penampungan utama di Desa Landu.

Plt. Dirut PDAM mengkonfirmasi bahwa PDAM lebih berperan dalam memberikan dukungan teknis yang bersifat konsultatif, seperti rekomendasi pengelolaan sumber air lokal, sistem penampungan air hujan, dan pengelolaan distribusi air secara sederhana dan berkelanjutan. Kepala Urusan Pelayanan turut berperan dalam proses penyaluran bantuan profil tank dan memastikan bantuan tersebut dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat.

Temuan kreativitas ini memperkuat pandangan Paredes-Saavedra dkk. (2024) bahwa *creative synergy* memungkinkan integrasi kemampuan dan pengetahuan individu untuk menghasilkan hasil yang superior. Dalam konteks Desa Landu, inovasi distribusi profil tank merupakan bentuk kreativitas adaptif terhadap kondisi geografis dan infrastruktur yang terbatas, yang terwujud melalui sinergitas antara Kepala Desa dan BPD dalam merespons kebutuhan dasar masyarakat.

### 3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Secara keseluruhan, sinergitas antara Kepala Desa dan BPD Desa Landu dalam penyediaan air bersih telah terbentuk melalui interaksi kelembagaan yang dilandasi oleh komunikasi formal melalui forum Musrenbang, mekanisme umpan balik melalui musyawarah desa, komitmen bersama dalam pelaksanaan program, serta inovasi adaptif dalam pengelolaan air bersih. Sama halnya dengan temuan Firman (2020) bahwa optimalisasi fungsi BPD bergantung pada kualitas hubungan kemitraan dengan Kepala Desa, penelitian ini menemukan bahwa sinergitas kelembagaan yang terbangun di Desa Landu merupakan refleksi dari hubungan kemitraan yang relatif harmonis antara kedua lembaga tersebut.

Berbeda dengan temuan Anugerah dkk. (2024) pada konteks pengelolaan sampah perkotaan yang melibatkan banyak aktor dengan sumber daya yang relatif memadai, sinergitas di Desa Landu beroperasi dalam kondisi keterbatasan infrastruktur dan geografis yang signifikan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa inovasi dan kreativitas kelembagaan menjadi semakin kritis dalam konteks desa kepulauan yang menghadapi

keterbatasan struktural. Temuan penelitian ini selaras dengan studi Daniel, Al Djono, dan Iswarani (2023) yang menemukan bahwa program air bersih berbasis masyarakat di Indonesia tidak selalu berhasil meskipun partisipasi tinggi, mengingat faktor sistem pembayaran tarif dan jenis sambungan turut menentukan keberlanjutan layanan. Temuan ini juga sejalan dengan Jackson, Stewart, dan Beal (2019) yang menegaskan bahwa keterbatasan struktural pada komunitas terpencil dan kepulauan menuntut pendekatan tata kelola yang lebih kolaboratif dan adaptif dibandingkan komunitas perkotaan dengan sumber daya yang lebih memadai.

### 3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan faktor penghambat sinergitas yang berkaitan dengan kondisi geografis Desa Landu sebagai desa kepulauan. Keterbatasan akses terhadap layanan PDAM menjadi hambatan utama yang memaksa pemerintah desa untuk lebih mengandalkan pengelolaan air mandiri. Belum adanya Peraturan Desa yang secara khusus mengatur pengelolaan air bersih juga menjadi faktor penghambat yang berpotensi mengurangi kekuatan hukum dalam implementasi program. Di sisi lain, faktor pendukung sinergitas mencakup mekanisme musyawarah desa yang telah terlembagakan, adanya kesamaan visi antara Kepala Desa dan BPD, serta dukungan moral dari masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari program bantuan profil tank.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa sinergitas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyediaan air bersih di Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, telah terbentuk melalui kolaborasi kelembagaan yang ditandai oleh komunikasi formal melalui forum Musrenbang, mekanisme umpan balik melalui musyawarah desa, komitmen bersama dalam pelaksanaan program, serta inovasi berupa distribusi profil tank dan rencana pembangunan pipa bawah laut. Namun sinergitas tersebut belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan distribusi informasi kepada seluruh masyarakat, belum adanya Peraturan Desa yang mengikat terkait pengelolaan air bersih, serta keterbatasan infrastruktur dan koordinasi dengan pihak PDAM.

**Rekomendasi.** Disarankan agar Pemerintah Desa Landu segera merumuskan Peraturan Desa tentang pengelolaan air bersih, mengoptimalkan saluran komunikasi

informal, serta memperkuat kolaborasi dengan PDAM dan pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur air bersih yang berkelanjutan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu penelitian yang relatif singkat (dua minggu) dan dilakukan hanya pada satu lokasi desa. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data sekunder terkait infrastruktur air bersih Desa Landu juga menjadi kendala dalam memperkuat analisis kuantitatif pendukung.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan metode komparatif antara beberapa desa kepulauan di Kabupaten Rote Ndao untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pola sinergitas kelembagaan dalam penyediaan air bersih di daerah dengan karakteristik geografis serupa. Selain itu, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas Peraturan Desa tentang pengelolaan air bersih apabila telah dirumuskan dan diimplementasikan oleh Pemerintah Desa Landu.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Landu beserta seluruh jajaran pemerintah Desa Landu, Ketua dan anggota BPD Desa Landu, Camat Rote Barat Daya, Plt. Dirut PDAM Kabupaten Rote Ndao, serta seluruh informan yang telah berkenan memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Terima kasih pula kepada Drs. Maichel Wutoy, M.M selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor.

## VI. DAFTAR PUSTAKA


Anugerah, M. F., Fadhli, M., & Yahya, M. R. (2024). Analisis sinergitas aktor *good governance* dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 7(1), 1–30. https://doi.org/10.36341/jdp.v7i1.3817

Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak menurut provinsi dan klasifikasi desa*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODU0IzI=/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sumber-air-minum-layak-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-desa--persen-.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). *Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak*. https://ntt.bps.go.id/en/statistics-table/2/MTc5MiMy/persentase-rumah-tangga-dengan-akses-air-minum-layak.html

Bota, R. M., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2024). Pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah desa dalam penyediaan air bersih di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(1), 216–230. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.903

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Daniel, D., Al Djono, T. P., & Iswarani, W. P. (2023). Factors related to the functionality of community-based rural water supply and sanitation program in Indonesia. *Geography and Sustainability*, 4(1), 29–38. https://doi.org/10.1016/j.geosus.2022.12.002

Firman. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 39–52. https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.35

Jackson, M., Stewart, R. A., & Beal, C. D. (2019). Identifying and overcoming barriers to collaborative sustainable water governance in remote Australian Indigenous communities. *Water*, 11(11), 2410. https://doi.org/10.3390/w11112410

Kushandajani. (2017). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 53–64. https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nadirah, Z. (2023). *Strategi pemerintah desa dalam penyediaan air bersih di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Pinrang].

Paredes-Saavedra, M., Vallejos, M., Huancahuire-Vega, S., Morales-García, W. C., & Geraldo-Campos, L. A. (2024). Work team effectiveness: Importance of organizational culture, work climate, leadership, creative synergy, and emotional intelligence in university employees. *Administrative Sciences*, 14(11), 280. https://doi.org/10.3390/admsci14110280

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (2016). https://peraturan.bpk.go.id/Details/103262/permendagri-no-110-tahun-2016

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. (2010). https://regulasi.bkpk.kemkes.go.id/detail/e5a12826-bed5-4325-b617-5ae02f813a66/

Suryandari, H., & Isbandono, P. (2025). Optimalisasi peran pemerintah desa dalam mengatasi krisis air bersih akibat musim kemarau di Kecamatan Sukosewu Desa Sumberjokidul Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pemerintahan*, 3(2), 184–193.

United Nations. (n.d.). *Goal 6: Ensure access to water and sanitation for all*. United Nations Sustainable Development Goals. https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2024). https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019

